

**PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALEMBANG**

Ela Sintya Maulana
NPP. 29.0395

Asdaf Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Program Studi Keuangan Publik

Email: shintyaela@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problem, namely that the assets owned by the Regional Government of Palembang City are still not well coordinated. There are still some goods belonging to the local government whose designation and location are not clear. If this is left unchecked, it will certainly have an impact in the form of a large number of assets being used or managed optimally.* **Purpose:** *The purpose of this study is to determine whether there is an effect of fixed asset administration on the quality of the Palembang City Government Financial Report.* **Method:** *This study uses quantitative methods with technical data analysis using inferential statistics with the aim of analyzing sample data to make conclusions that apply generally.* **Results/Findings:** *The results of the hypothesis test show that is rejected and is accepted. This means that the quality of local government financial reporting is influenced by the management of fixed assets. The correlation coefficient shown shows that there is a strong categorical relationship between fixed asset management and the quality of local government financial reporting. In addition, the results of the coefficient of determination show that the quality of LKPD is influenced by fixed asset management by 36.36%, while other variables are influenced by 63.64%.* **Conclusion:** *That fixed asset management has a positive impact on the quality of LKPD. In other words, the more orderly the management of fixed assets, the higher the quality of the LKPD. In addition, the results of this study provide empirical evidence that there is a significant relationship between the two variables. This level of importance means that fixed asset management plays an important role in improving the quality of LKPD.*

Keywords: *Administration, Fixed Assets, Financial Statements*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yaitu adanya aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Palembang masih belum terkoordinir dengan baik. Masih terdapat beberapa barang milik pemerintah daerah yang peruntukan dan juga lokasinya belum jelas. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja tentu akan menimbulkan dampak yang berupa banyaknya aset yang digunakan maupun dikelola dengan optimal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penatausahaan Aset tetap terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknis analisis data menggunakan statistik inferensial dengan tujuan diperoleh menganalisis data sampel guna dibuat kesimpulan yang berlaku secara umum. **Hasil/Temuan:** Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwasanya H_0 ditolak serta H_a diterima. Artinya kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan aset tetap. Koefisien Korelasi yang ditampilkan menunjukkan bahwasanya terdapat hubungan kategoris yang kuat antara pengelolaan aset tetap dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwasanya kualitas LKPD dipengaruhi oleh pengelolaan aset tetap sebesar 36,36%, sedangkan variabel lain dipengaruhi sebesar 63,64%. **Kesimpulan:** Bahwasanya pengelolaan aset tetap berdampak positif atas kualitas LKPD. Dengan kata lain, semakin tertib pengelolaan aset tetap, semakin tinggi kualitas LKPD. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Tingkat kepentingan tersebut berarti bahwasanya pengelolaan aset tetap berperan penting dalam peningkatan kualitas LKPD.

Kata Kunci: Penatausahaan, Aset Tetap, Laporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada pertengahan tahun 1998 Indonesia mengalami perubahan yang ditandai dengan beralihnya era orde baru ke era reformasi yang menciptakan perubahan besar pada seluruh aspek kehidupan dan yang paling mendasar adalah dalam tatanan kenegaraan yang menjadi lebih demokratis. Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian mengalami perubahan kembali yang hingga pada saat ini

masih berlaku yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6): “Otonomi Daerah merupakan hak, kewajiban, dan wewenang dari daerah otonom dalam rangka mengatur serta mengurus sendiri seluruh urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibutuhkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan terkait keuangan daerah dengan diwajibkannya pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan menjadi suatu bukti media terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan selama 1 tahun anggaran. Data yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan realisasi dari kinerja dan pertanggungjawaban dari penggunaan keuangan daerah. salah satu aset daerah Kota Palembang yang mengalami sengketa yaitu Masjid Raya Agung Sriwijaya Palembang. Sejak proses pembangunan, masjid ini sudah mengalami permasalahan yang terungkap di dalam sidang lanjutan yang beragenda tentang keterangan saksi atas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana hibah dari pembangunan Masjid Agung Raya Sriwijaya di Pengadilan Negeri Palembang. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Naimullah mengatakan pada tahun 2015 Pemprov pernah digugat oleh masyarakat yang menganggap memiliki hak atas tanah lokasi di tempat berdirinya masjid tersebut. Selanjutnya Pulau Kemaro yang merupakan salah satu kawasan pariwisata dengan tingkat daya tarik yang ditambah dengan tersedianya dan dibangunnya Klenteng Hok Tjing Rio yang disertai pagoda setinggi 9 tingkat yang lekat dengan nuansa dan juga kebudayaan Tiongkok. Konflik pada kawasan pulau Kemaro ini bermula pada saat Pemerintah Kota Palembang yang merencanakan dan juga merancang program pembangunan wisata air di pulau tersebut, terjadi sengketa kepemilikan lahan Pulau Kemaro antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam pengelolaan dan pengurusan aset daerah itu sendiri dilaksanakan dengan berlandaskan beberapa asas yaitu; kepastian hukum, efisiensi, fungsional, akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi serta kepastian nilai. Menurut (Suwanda, 2013), dalam pengelolaan aset setidaknya meliputi beberapa bagian yang terdiri dari tahapan Perencanaan dan penganggaran hingga pertanggungjawaban atas pengelolaan aset. Tertib tidaknya pengelolaan aset dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya suatu kesempurnaan dalam penyajian neraca bagian aset yang dipersiapkan untuk kebutuhan audit oleh BPK di setiap akhir tahun anggaran. Wujud dari pertanggungjawaban pengelolaan aset ini akan disajikan dalam laporan keuangan dalam bentuk neraca yang membuat laporan aset daerah. Pada kenyataannya yang terjadi adalah aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Palembang masih belum terkoordinir dengan baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang yaitu

aset- aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Palembang masih belum terkoordinir dengan baik. Masih terdapat beberapa barang milik pemerintah daerah yang peruntukan dan juga lokasinya belum jelas. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja tentu akan menimbulkan dampak yang berupa banyaknya aset yang digunakan maupun dikelola dengan optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka selanjutnya aset – aset yang ada juga dimiliki pemerintah kota Palembang perlu mengoptimalkan penatausahaan atas aset daerah yang di miliki sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan akuntabilitas publik. BPK menilai dan juga masih menemukan beberapa bagian dalam pengelolaan keuangan yang belum optimal di Pemerintah Kota Palembang yang salah satunya adalah dalam pelaksanaan pengelolaan atas aset tetap seperti adanya aset yang dicatat secara gabungan, ataupun tidak ditemukannya aset tetap dalam catatan pemerintah daerah yang keberadaannya tidak ditemukan maupun sudah dimiliki oleh pihak lain.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Mela Efridenty berjudul *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon*, menemukan bahwasannya Hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Chatarina De Ricci yang berjudul *Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya hasil penelitian mengungkapkan ketidaklengkapan dokumen perolehan, kurangnya SDM yang handal untuk menjalankan SIMDA BMD, pemahaman yang kurang dari SDM tentang penerapan akuntansi pemerintah berbasis actual serta koneksi jaringan SIMDA BMD. Penelitian berikutnya yaitu dari Martini yang berjudul *Peran Penatausahaan Aset Tetap Untuk Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang* yang berkesimpulan bahwasannya hasil penelitian adalah inventarisasi dan pelaporan berpengaruh, tetapi pembukuan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pemerintah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang berbeda dan lokasi penelitian dilakukan pada Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Berbeda dari Mela Efridenty, Chatarina De Ricci dan Martini. Selain itu berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa rata-rata tingkat respons responden terhadap indikator fluktuasi penatausahaan aset tetap adalah 89,86%, dan responden dalam kategori sangat baik. Kualitas yang dinyatakan oleh LKPD juga dapat dibaca dari

hasil tingkat tanggapan responden terhadap variabel indikator Kualitas LKPD rata-rata mencapai 89,22%. Artinya kualitas LKPD dapat digolongkan sangat baik.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penatausahaan Aset tetap terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan data statistic inferensial dengan tujuan dapat menganalisis data sampel untuk dibuat kesimpulannya secara umum. Kemudian rumus korelasi yang digunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana pengaruh penatausahaan aset tetap (X) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dalam penelitian ini adalah rumus korelasi *product moment* sebagai berikut

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi antara x dan yN

:Jumlah subjek

$\sum X$:Jumlah nilai variabel x

$\sum Y$:Jumlah nilai variabel y

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat variabel x

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat variabel y

Selanjutnya dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi dimana bertujuan untuk memperkirakan berapa kontribusi variabel X terhadap variabel Y. dapat dihitung dengan rumus

$$R = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R : Koefisien

Determinasi : Koefisien Korelasi

Hipotesis

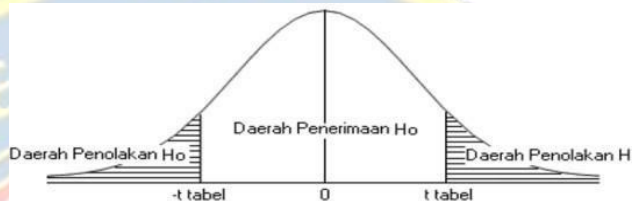
H₀: Tidak terdapat pengaruh Penatausahaan aset tetap terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

H_a : Terdapat pengaruh Penatausahaan aset tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan penatausahaan aset tetap (X) dengan kualitas laporan keuangan (Y) maka peneliti memilih menggunakan korelasi *productmoment* yang dilanjutkan dengan regresi linear sederhana sebagai berikut:

Gambar 2.1



Sumber : Sugiyono, 2018

Keterangan:

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara X dan Y

H_a : Terdapat hubungan antara X dan Y

H_0 : $\rho = 0$ (tidak terdapat hubungan X terhadap Y)

H_a : $\rho \neq 0$ (terdapat hubungan X terhadap Y)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kota Palembang menggunakan teori Penatausahaan aset tetap dari Djanegara yaitu pembukuan, inventarisasi, pelaporan. Kemudian juga menggunakan teori Sinurat tentang karakteristik kualitas laporan keuangan. Teori tersebut memiliki 4 karakteristik yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dapat dipahami. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang

Tabel 1.
Presentase Skor Tanggapan Respons Terhadap Penatausahaan Aset Tetap

No.	Sub Variabel	Skor Tanggapan Responden	Kategori
1	Pembukuan	90,41%	Sangat Baik
2	Inventarisasi	89,83%	Sangat Baik
3	Pelaporan	89,35%	Sangat Baik
Rata – Rata		89,86%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil persentase tanggapan responden terhadap pengelolaan aset tetap pada tabel di atas, melihat sub variabel penerapan akuntansi, persediaan, dan pelaporan, terlihat bahwa rata-rata tanggapan responden adalah 89,86%. Dengan kata lain Penatausahaan Aset Tetap BPKAD Kota Palembang berada pada kategori “Sangat Baik” berdasarkan tanggapan dari para responden.

Tabel 2.
Persentase Skor Tanggapan Respons Terhadap Kualitas LKPD

No.	Sub Variabel	Skor Tanggapan Responden	Kategori
1	Relevan	88,89%	Sangat Baik
2	Andal	87,50%	Sangat Baik
3	Dapat Dibandingkan	90,28%	Sangat Baik
4	Dapat Dipahami	90,21%	Sangat Baik
Rata – Rata		89,22%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil persentase tanggapan responden terhadap kualitas LKPD pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden yang diperoleh dengan melihat implementasi dari Sub Variabel relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami maka diperoleh rata-rata 89,22% yang berarti Kualitas LKPD berdasarkan tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Lebih jelasnya terkait persentase tanggapan responden untuk Variabel Penatausahaan Aset Tetap (X) dan Variabel Kualitas LKPD (Y) yang dilakukan di atas dapat dilihat pada lampiran III. Berdasarkan hasil tabel 4.31 tersebut menunjukkan bahwa sub variabel Pembukuan mendapatkan skor tanggapan responden terbesar yaitu dengan persentase 90,41%, kemudian diikuti dengan sub variabel Inventarisasi sebesar 89,83%, dan yang mendapatkan skor tanggapan responden terendah adalah sub variabel Pelaporan dengan persentase sebesar 89,35%

3.2 Besar Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa peningkatan penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap peningkatan kualitas LKPD, yaitu dengan nilai Koefisien Determinasi 0,603 yang berarti 36,36% Kualitas LKPD Kota Palembang dipengaruhi oleh adanya Penatausahaan Aset Tetap dan sisanya sebesar 63,64% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji analisis korelasi menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berhubungan dengan kualitas LKPD di Kota Palembang dengan koefisien korelasi sebesar 0,603. Hal ini dikarenakan kedua variabel tersebut searah karena arah korelasi kedua variabel dalam kategori “kuat” adalah positif. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai pengelolaan aset maka semakin tinggi

pula nilai kualitas LKPD. Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kualitas LKPD Kota Palembang. Kesimpulan ini dapat diketahui karena pada uji *t-student* diperoleh nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* $<0,05$ ($0,002 < 0,05$). Besar *t_{hitung}* 3,550, sehingga besar *t_{hitung}* lebih besar dibanding *t_{tabel}* yaitu $3,550 > 2.0739$, dengan demikian maka dapat diketahui jika H_0 ditolak dan H_a diterima. dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan Kota Palembang. Oleh karena itu, agar pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palembang lebih berkualitas, perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi penerapan penatausahaan aset tetap di masa mendatang.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berdampak positif terhadap kualitas LKPD. Dengan kata lain, semakin tertib pengelolaan aset tetap, semakin tinggi kualitas LKPD. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Tingkat kepentingan tersebut berarti bahwa pengelolaan aset tetap berperan penting dalam peningkatankualitas LKPD.

Penelitian ini sudah berjalan dengan sangat baik seperti temuan Mala Efridenty (Mala Efridenty, 2021), namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu para pegawai yang bertugas pada bidang penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dapat melaksanakan seluruh indikator penatausahaan aset tetap yang telah di tentukan.

Selain itu, kualitas LKPD Kota Palembang sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintahan dalam PP no. 70 Tahun 2010 yang membahas Standar Akuntansi Pemerintahan dimana laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menyediakan berbagai informasi relevan berkaitan dengan posisi keuangan dan semua transaksi entitas pelapor yang terjadi selama suatu periode seperti temuan dari Chatarina De Ricci (Chatarina De Ricci, 2021).

Meskipun begitu, penelitian ini juga memiliki kekurangan lain yaitu Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kualitas LKPD Kota Palembang. Kesimpulan ini dapat diketahui karena pada uji *t-student* diperoleh nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* $<0,05$ ($0,002 < 0,05$). Besar *t_{hitung}* 3,550, sehingga besar *t_{hitung}* lebih besar dibanding *t_{tabel}* yaitu $3,550 > 2.0739$, dengan demikian maka dapat diketahui jika H_0 ditolak dan H_a diterima. dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan Kota Palembang. Oleh karena itu, agar pelaporan keuangan Pemerintah Kota Palembang lebih berkualitas, perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi penerapan penatausahaan aset tetap di masa mendatang tidak seperti temuan dari Martini (Martini, 2020).

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hasil survei terlihat bahwa rata-rata tingkat respons responden terhadap indikator fluktuasi penatausahaan aset tetap adalah 89,86%, dan responden dalam kategori sangat baik. Kualitas yang dinyatakan oleh LKPD juga dapat dibaca dari hasil tingkat tanggapan responden terhadap variabel indikator Kualitas LKPD rata-rata mencapai 89,22%. Artinya kualitas LKPD dapat digolongkan sangat baik. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan aset tetap. Koefisien Korelasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa terdapat hubungan kategoris yang kuat antara pengelolaan aset tetap dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa kualitas LKPD dipengaruhi oleh pengelolaan aset tetap sebesar 36,36%, sedangkan variabel lain dipengaruhi sebesar 63,64%

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap berdampak positif atas kualitas LKPD. Dengan kata lain, semakin tertib pengelolaan aset tetap, semakin tinggi kualitas LKPD. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Tingkat kepentingan tersebut berarti bahwasanya pengelolaan aset tetap berperan penting dalam peningkatan kualitas LKPD

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintah Kota Palembang sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Djanegara dan Sinurat

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. (2012). *Manajemen Aset Daerah : Sistem dan Prosedur Barang Milik Daerah*. Wikipedia.
- Akbar, B. (2013). *Akuntansi Pemerintah* (1st ed.). CV. Bumi Metro Jaya. Arikunto.

- (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. RinekaCipta. Burhan, B. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Darmawan, D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif (II)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Darsonia, W. (2018). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. *Diss.*
- Ghozali, I. (2017). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS-24*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanto, Y. (2010). *Peranan Penatausahaan Barang Milik Negara*.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (2nd ed.)*. Salemba Empat.
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods Qualitatives and*
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods Qualitatives and Quantitaives Approaches (Seventh)*. Pearson and AB.
- Singh, K. (2007). *Quantitative Social Research Methods*. Sage Publications.
- Sinurat, M. (2016). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Pustaka Rahmat.
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Siregar, D. (2004). *Manajemen Aset*. Gramedia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*. Alfabeta.
- Suryani, & Hendrayadi. (2018). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Prenada Media Group.
- Suwanda. (2013). *Optimalisasi Aset Pemda*. PPM Manajemen.
- Suwanda, D. (2015). *Optimalisasi Pengelolaan Aset PEMDA*. PPM Manajemen.
- Wahyu, W. (2018). *Dasar - Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Widiyanyo, M. A. (2013). *Statistika Terapan*. Elex Media Komputindo.
- Yusuf, M. (2010). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat.